

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

Radar Lampung

7

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Tanggal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Bulan | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGU | SEP | OKT | NOV | DES | 2021 |
| | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |

Kepala DPKP Bantah Isu Bagi-Bagi Proyek

KOTABUMI - Merebaknya isu pengadaan barang dan jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Lampung Utara (Lampura) yang telah selesai digelar dibantah Kepala DPKP Erwin Syaputra.

Kepada *Radar Lampung* di ruang kerjanya, Erwin menegaskan informasi tersebut mengada-ada alias hoaks. Pasalnya, hingga saat ini pengadaan barang dan jasa di dinas yang dipimpinnya belum sampai tahap pelelangan. "Bagaimana kita mau bagi-bagi proyek, lelang pun belum digelar. Jadi saya pastikan itu kabar hoaks," tegasnya, Jumat (5/3).

Menurut Erwin, pihaknya kini sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak. Termasuk ke Bupati Lampung

Budi Utomo, Kepala BPKAD Desyadi, serta Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Chandra Setiawan. "Saat ini, kita belum masuk tahap lelang karena instruksi dari pusat tentang *refocussing* anggaran tahun ini. Jangan sampai, setelah kita masuk tahap lelang, nantinya adanya pengurangan," bebarnya.

Apalagi, lanjut Erwin bupati sudah mewanti-wanti agar jalannya program bisa berjalan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan berlaku. "Bupati mengarahkan kepada jajaran untuk berhati-hati, agar dapat berjalan sesuai. Jangan sampai ada permasalahan, apalagi sampai membias keluar. Itu yang sekarang kami coba jalankan, sekuat tenaga pikiran agar semua baik, se-

butnya. Dan pihaknya mengajak kepada elemen masyarakat agar bersama-sama mendukung program dijalankan pemerintah di tengah pandemi saat ini. "Alhamdulillah berkat kerja sama seluruh elemen masyarakat, masih ada program pemerintah berjalan. Khususnya berasal dari pusat, dan ke depan kita berupaya kuat agar program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dapat terealisasi di sini. Mohon doa dan dukungannya," kata Erwin Syaputra.

Terpisah, Pengadaan Barang dan Jasa Setkab Lampura, Chandra Setiawan mengatakan, pihaknya belum melelang. Sampai kini, belasan OPD belum menyerahkan input informasi rencana umum pengadaan. "Masih

banyak yang belum menyerahkan, mungkin terkendala dengan perubahan peraturan menteri belum lama ini. Masalah refocusing, jadi mereka sedikit terkendala," kata Chandra Setiawan. Beberapa satker tersebut, menurutnya seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), BKPSDM, Kesbangpol, Disdikbud, BPBD, BPPRD, BPKAD, Dispora, Dinas Ketahanan Pangan (DKP), Dinas Koperasi dan UMKM, kemudian, perlindungan perempuan dan anak (DP2A), KB dan Pengendalian Penduduk (DP2KB), Perikanan, Pertanian dan Sekretariat Korpri.

Sementara yang telah selesai menginput, beberapa diantaranya yakni Dinas Perdagangan, DPKP (Perkim), Inspektorat, BABDA, Kesekre-

tariatian Pemkab, dan Kesekretariatian Dewan dan lain-lainnya. "Terus kita imbau mereka, agar segera menyerahkan draftnya agar dapat dilakukan pekerjaan. Sebab, tanpa itu seluruh pengadaan, baik melalui sistem tender bahkan pengadaan langsung (PL) tak dapat dilakukan. Meski hanya untuk alat kantor," terangnya.

la juga menyangkal informasi yang berkembar di masyarakat, khususnya di media sosial yang menyatakan di berapa OPD lelang sudah selesai dan bahkan sudah ada pemenang "Apalagi sampai sudah ada pemenangnya, tidak benar itu. Saat ini kami sedang mempersiapkan tahapan-tahapannya, dan semua harus ada laporan. Saya pastikan itu (lelang) ilegal kalau demikian," tegasnya. (ozy/c1/nca)